

RENCANA KERJA (RENJA)

2024

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA KENDARI**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNYA sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari untuk Tahun Anggaran 2024 selesai disusun.

Rencana Kerja ini dibuat sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama tahun 2024 dalam rangka menunjang pembangunan wilayah di Kota Kendari.

Harapan kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat berfungsi maksimal dalam pelayanan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder dan beneficiaries* .

Kendari, 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Kendari,

Ir. Hj. St. Ganef, M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19630918 199103 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat yang ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024;
3. Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Daerah pada Tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti

tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Adapun bagan alir Penyusunan Renja PD adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1 di bawah ini.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 yang dituangkan dalam dokumen Renja ini merupakan kegiatan yang sifatnya strategis dan prioritas yang disinergikan dengan program dan kegiatan prioritas serta strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia. Sumber dan yang diharapkan untuk membiayai usulan-usulan program dan kegiatan yang dimuat dalam dokumen Renja ini berasal dari dana APBD dan APBN.



Sumber : Permendagri Nomor 86, 2017

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kebijakan dan program pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari direncanakan secara baik dalam jangka menengah dengan harapan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Rencana Strategis (Renstra) merupakan program kerja pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam kurun waktu 2023-2026 yang dijadikan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja pada setiap tahunnya sehingga dalam kurun waktu empat tahun kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dapat diwujudkan. Penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra PD 2023-2026. Renja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran PD.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104;
2. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;
3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700;

5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Kendari Tahun 2001-2020;
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 847 Tahun 2005 tentang RPJMD Kota Kendari Tahun 2005-2009;
13. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 16 Tahun 2008 tentang RPJMD Kota Kendari Tahun 2008-2012;

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2012-2030;
16. Peraturan Walikota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari 2023-2026
17. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 33 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026
18. Peraturan Wali Kota Kendari Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kendari Tahun 2023-2026
19. Peraturan Walikota Kendari Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Kendari.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan perencanaan tahunan PD;
2. Menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023;
3. Sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah :

1. Untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada dalam dokumen Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024;

2. Untuk mengetahui sasaran, indikator kinerja, target yang akan dicapai, dan pagu anggaran yang akan diusulkan pada periode Tahun Anggaran 2024;
3. Untuk melengkapi Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari sampai dengan Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Tahun 2022
Kota Kendari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (tahun 2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+8	10=(9/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%						
2.08.01.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Tersedia	100%						
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	100

2.08.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	100
2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	100
2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 dokumen				2 dokumen	2 dokumen	100
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	3 dokumen	150
2.08.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100
2.08.01.1.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%						
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/ bulan	33 orang bulan	33 orang/bulan	100	33 orang / bulan	66 orang/bulan	180
2.08.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	24 dokumen	200

2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	200
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesterab SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/seemsteran SKPD	- 12 lap.bulanan '- 4 lap.triwulanan '- 2 laporan semesteran '- 1 lap. Koordinasi	12 laporan	12 laporan	100	- 12 lap.bulanan '- 4 lap.triwulanan '- 2 laporan semesteran '- 1 lap. Koordinasi	31 Laporan	163
2.08.01.1.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Administrasi BMD PD yang Tersedia	100%						
2.08.01.1.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100
2.08.01.1.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	2 laporan	200
2.08.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 laporan				1 laporan	1 laporan	100
2.08.01.1.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Yang Tersedia	100%				100%		
2.08.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0%				50 paket	50 paket	

2.08.01.1.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pendataan dan pengolahan adminitsrasi kepegawaian	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100
2.08.01.1.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawaian	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100
2.08.01.1.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen	100
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang (1 struktural + 5 fungsional)				9 orang (3 struktural + 6 fungsional)	9 orang	180
2.08.01.1.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang				50 orang	50 orang	125
2.08.01.1.05.11	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	2 orang	2 orang	100	3 orang	7 orang	140
2.08.01.1.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedia	100%						
2.08.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasai/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket				1 paket		
2.08.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket				1 paket		
2.08.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	200
xx2.08.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistsik kantor	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	200

2.08.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	200
2.08.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15 dokumen				15 dokumen		
2.08.01.1.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah paket penyediaan bahan/material	2 paket (material kantor dan bahan pameran)	2 paket	2 paket	100	2 paket (material kantor dan bahan pameran)	4 paket	200
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	200
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	200
2.08.01.1.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	9 dokumen				9 dokumen	9 dokumen	100
2.08.01.1.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	12 laporan	12 laporan	100	12 dokumen	24 dokumen	200
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya BMD Penunjang Operasional Pemerintah Daerah	100%				100%		
2.08.01.1.07.01	Pengadaan kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan					1 unit kendaraan roda 4		
2.08.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 unit roda 2				1 unit roda 2	1 unit	100
2.08.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel	1 paket				1 paket	1 paket	100
2.08.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit PC 2 unit laptop 2 printer	3 unit	3 unit	100	1 unit PC 2 unit laptop 2 printer	8 unit	160

2.08.01.1.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya					1 unit		
2.08.01.1.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit				1 unit	1 unit	100
2.08.01.1.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit				1 unit	1 unit	100
2.08.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100%				100%		
2.08.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	200
2.08.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	200
2.08.01.1.08.04	Pemyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	24 laporan	200
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Terpelihara	100%				100%		
2.09.010.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100

2.09.010.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 mobil operasional, 5 unit motor	2 mobil + 4 unit motor	2 mobil + 4 unit motor	100	2 mobil operasional, 4 unit motor	2 mobil operasional, 4 unit motor	100
2.09.010.1.09.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	a.13 unit laptop/PC b. 10 printer c. 1 CCTV	10 unit	10 unit	100	a.10 unit laptop/PC b. 8 printer c. 1 CCTV		
2.09.010.1.09.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit		
2.09.010.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit		
2.09.010.1.09.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit				1 unit		
2.08.02	Program Pengarusutaaam Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	100%				100,00%		
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	80,00%				79,54%		
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Pemerintah Kota	45%				35%		

2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2 dokumen	200
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunanan responsif gender (PPRG)	45 perangkat daerah	45 perangkat daerah	45 perangkat daerah	100	45 perangkat daerah	90 perangkat daerah	200
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	60%				50%		
2.08.02.2.02..01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	5 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	6 dokumen	11 dokumen	220
2.08.02.2.02..02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 organisasi	-	-	-	8 organisasi	8 organisasi	80
2.08.02.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	6 lembaga				5 lembaga		

2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	100 orang				100 orang	100 orang	100
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	5 dokumen				3 dokumen	3 dokumen	60
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	1 : 1 3841				1:13.309		
2.08.03.201	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase pengurangan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	55%				50%		
2.08.03.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, prpgram dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	4 dokumen (Rapat Koordinasi Lintas Sektor, Sosialisasi Pencegahan KDRT sejak dini, Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kegiatan Pengembangan KIE Perlindungan Perempuan)	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 dokumen	8 dokumen	200
2.08.03.201.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	120 perangkat daerah	2 kegiatan	2 kegiatan	100	120 perangkat daerah	120 perangkat daerah	100

2.08.03.202	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100%				100%		
2.08.03.202.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten / kota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2.08.03.202.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota (UPTD PPA)	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
2.08.03.203	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	Persentase penurunan kasus KDRT	55%				50%		
2.08.03.203.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	13 laporan (Sosialiasi Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dan laporan operasionalisasi UPTD PPA)				13 laporan (Sosialiasi Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dan laporan operasionalisasi UPTD PPA)		

2.08.03.203.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	30 orang				30 orang		
2.08.03.203.03	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kab/kota (UPTD PPA)	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	100%				100%		
2.08.03.203.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen				1 dokumen		
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100%				100%		
2.08.04.201	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.	75%				70%		
2.08.04.201.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak	30 perangkat daerah				30 perangkat daerah		

2.08.04.201.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	3 dokumen				3 dokumen		
2.08.04.201.03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	1 laporan				1 laporan		
2.08.04.203	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase keluarga yang mendapatkan layanan di lembaga konsultasi keluarga	15%				10%		
2.08.04.203.01	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak	100%	1	1	100%	100%	200%	200%
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak	55%				50%		
2.08.05.201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Daerah kabupaten/Kota	Ketersediaan data terpilah Gender dan Anak	100%				100%		

2.08.05.201.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	200
2.08.05.201.02	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten / kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen				1 dokumen (penyediaan aplikasi SIGA+sosialisasi SIGA)	1 dokumen	100
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya persentase pemenuhan klaster KLA	78%						
2.08.06.201	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kelurahan Layak Anak	60%				54%		
2.08.06.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	77 organsasi	55 orang	55 orang	100	66 organisasi	121 organisasi	157
2.08.06.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	1 dokumen (11 kec)	1 dokumen (11 kec)	100	4 dokumen	5 dokumen	125

2.08.06.202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Ramah Anak	39 kelurahan				54%		
2.08.06.202.01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	100 orang				120 orang	120 orang	120
2.08.06.202.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen 510 orang peserta)	1 dokumen 510 orang peserta)	100	1 dokumen	2 dokumen	200
2.08.06.202.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	2 dokumen	1 dokumen (11 kec)	1 dokumen (11 kec)	100	2 dokumen	3 dokumen	150
2.08.06.202.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	1 dokumen	1 dokumen (pelatihan KHA)	1 dokumen (pelatihan KHA)	100	1 dokumen	2 dokumen	200
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	50%				20%		

2.08.07. 201	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100%				100%		
2.08.07.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	57 perangkat daerah	3 kegiatan	3 kegiatan	100	57 perangkat daerah		
2.08.07.201.02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	4 dok	3 kegiatan	3 kegiatan	100	4 dok	7 dokumen	175
2.08.07.202	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	100%				100%		
2.08.07.202.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota (UPTD PPA)	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	100%	100%	100%	100	100%	200%	200

2.08.07.202.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota (UPTD PPA)	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	100	100%		
2.08.07.202.03	Pengembangan komunikasi, Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen komunikasi, Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen		
2.08.07.202.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	1 dokumen				1 dokumen		
2.08.07.203	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kab/kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang sesuai standar	100%				100%		
2.08.07.203.01	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	13 dokumen (1 laporan koordinasui +12 laporan Operasional UPTD)	2 dokumen laporan	2 dokumen laporan	100	13 dokumen (1 laporan koordinasui +12 laporan Operasional UPTD)		

2.08.07.203.02	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	3 dokumen				3 dokumen		
2.08.07.203.03	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	1 dokumen	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	100	1 dokumen		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari, yaitu selain menangani masalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menangani masyarakat miskin melalui Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam hal peningkatan pemberdayaan perempuan di kelurahan pelaksanaan kegiatan didukung oleh organisasi perempuan yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan tingkat Kota Kendari yaitu dengan berbagai pembinaan kepada kader baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan dan ikut serta dalam kegiatan pemberdayaan lainnya.

Dalam urusan pemberdayaan perempuan juga terdapat unsur perlindungan perempuan dan anak yang mana peran perempuan dalam keluarga sangatlah penting ketahanan keluarga serta bagi perkembangan anak, Pemerintah Kota Kendari sudah berupaya untuk melakukan perlindungan perempuan dan anak dengan membentuk UPTD PPA pada tahun 2021 namun perlu dukungan dari berbagai pihak diantaranya pihak swasta, Lembaga Sosial Kemasyarakatan khususnya kelembagaan perempuan, akademisi dan masyarakat.

Pencapaian kinerja Dinas DPPPA Kota Kendari dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indeks pemberdayaan gender (IDG)		% kelembagaan PUG aktif, % Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG, Rasio KDRT, % Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	82,24	83,0	84,3	85,5	83,22	-		83,0	
2.	Capaian Status Kota Layak Anak		% Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak, % penurunan kasus kekerasan terhadap anak	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Nindya	-	Nindya	Nindya	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Kendari adalah salah satu Perangkat Daerah yang menangani masalah perempuan dan anak yang didalamnya terkandung unsur-unsur/aspek kehidupan secara menyeluruh, oleh karenanya DPPPA dituntut untuk mampu memberdayakan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Kendari adalah :

1. Masih rendahnya kualitas perempuan dalam pencapaian Kesetaraan dan Keadilan gender dalam pembangunan
2. Rendahnya kesadaran dan kemampuan perempuan untuk berdaya
3. Belum optimalnya kelembagaan PUG
4. Belum optimalnya Tingkat Pencapaian Kota Layak Anak (Utama, KLA),
5. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan yang dialami perempuan dan anak
6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung lembaga perlindungan perempuan dan anak
7. Rendahnya persentase perangkat daerah yang memiliki dan menggunakan data gender dan anak
8. Belum adanya Sistem Informasi Gender dan Anak yang menyajikan data secara komprehensif
9. Belum optimalnya peran keluarga dan pengasuhan alternatif dalam meningkatkan kualitas keluarga.
10. Masih adanya kasus stunting di Kota Kendari mencapai 365 balita dan Prevalensi stunting 19,5 % pada tahun 2022 meskipun angkanya masih di bawah provinsi Sulawesi Tenggara (30,2 %).

Tantangan yang cukup berat dan dirasakan adalah semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Kendari, semakin kritis dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat sehingga merupakan kewajiban dari setiap aparat Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik baiknya kepada masyarakat. Sedangkan peluang yang ada dan memungkinkan untuk bisa melaksanakan kegiatan pelayanan menjadi lebih baik adalah antara lain adanya kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bersama sama membangun kehidupan yang lebih aman dan nyaman, serta semakin meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap perempuan dan anak.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun rencana pembangunan tahunan berpijak pada kebijakan pemerintah Kota secara umum yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Kendari Tahun 2023-2026 yang teknis operasional perencanaan tahunan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2023 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang diselaraskan antara perencanaan program kegiatan secara umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari.

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Kendari

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kendari	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.370.938,867	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.374.501,578	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Tersedia	100 %	17.510	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan Anggaran Yang Tersedia	100 %	28.000	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100 %	3.234.131,468	Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100 %	3.716.334,947	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Persentase Administrasi BMD PD yang Tersedia	100 %	9.748,398	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Persentase Administrasi BMD PD yang Tersedia		12.366,638	
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian PD Yang Tersedia	100 %	298.410	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian PD Yang Tersedia		472.000	
5	Administrasi umum perangkat daerah		Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedia	100 %	385.515,584	Administrasi umum perangkat daerah		Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedia		537.800	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya BMD Penunjang Operasional Pemerintah Daerah	100%	151.390	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya BMD Penunjang Operasional Pemerintah Daerah		608.000	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100 %	52.933, 418	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia		51.282,863	
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Yang Terpelihara	100 %	222.300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Yang Terpelihara		239.000	
II	Program Pengarusutaaam Gender dan Pemberdayaan Perempuan		a. Persentase kelembagaa n PUG aktif b. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	a. 100 % b. 80 %	345.948,927 300.000	Program Pengarusutaaam Gender dan Pemberdayaan Perempuan		c. Persentase kelembagaa n PUG aktif d. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG		627.134,881	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase ARG pada Pemerintah Kota	45 %	70.039,623	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase ARG pada Pemerintah Kota	45 %	67.999,634	
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum , Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	60 %	358.579,304	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum , Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	50 %	348.135,247	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
3	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Peningkatan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	6 lembaga	217.330	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Peningkatan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	5 lembaga	211.000	
III	Program Perlindungan Perempuan		Rasio KDRT	1: 13.841	335.854,113	Program Perlindungan Perempuan		Rasio KDRT	1: 13.309	326.071,954	
1	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota		Persentase pengurangan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	55 %	130.101,889	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota		Persentase pengurangan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	50 %	126.312.514	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
2.	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota.		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100 %	23.442,223	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota.		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100 %	22.759,400	
3	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota		Persentase penurunan kasus KDRT	55 %	182.310	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota		Persentase penurunan kasus KDRT	50 %	177.000	
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100 %	104.030	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100 %	121.000	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota		Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.	75 %	97.850	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota		Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.	100 %	115.000	
2.	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase keluarga yang mendapatkan layanan di lembaga konsultasi keluarga	15 %	6.180	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase keluarga yang mendapatkan layanan di lembaga konsultasi keluarga	10 %	6..000	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak	55 %	80.900	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak	50 %	240.000	
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Daerah kabupaten/Kota		Ketersediaan data terpilah Gender dan Anak	100 %	80.900	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Daerah kabupaten/Kota		Ketersediaan data terpilah Gender dan Anak	100 %	240.000	
VI.	Program Pemenuhan Hak Anak		Meningkatnya persentase pemenuhan klaster KLA	78%	752.226,413	Program Pemenuhan Hak Anak		Meningkatnya persentase pemenuhan klaster KLA	75%	760.326,615	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Kelurahan Layak Anak	60 %	287.539,209	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kot a		Persentase Capaian Kelurahan Layak Anak	54 %	279.164,281	
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kelurahan Ramah Anak	39 kelurahan	464.687,204	Penguatan dan Pengembanga n Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot a		Jumlah Kelurahan Ramah Anak	35 kelurahan	500.398,921	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
VII	Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	50 %	622.053,604	Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	30 %	603.935,538	
1	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100 %	155.597,199	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100 %	146.088,886	
2	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	100 %	60.565,925	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	100 %	58.801,869	

No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
3.	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kab/kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang sesuai standar	100 %	405.890,480	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kab/kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang sesuai standar	100 %	394.068,427	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA didasarkan pada RPJMN Tahun 2020- 2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “Perlindungan perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

- 1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- 2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
- 3. prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%);
- 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- 6. TPAK Perempuan; dan
- 7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

- 1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
- 2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
- 3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4. penurunan pekerja anak; dan
- 5. pencegahan perkawinan anak.



Skema Perumusan Tujuan Kemen PPA

Tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari adalah terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak melalui Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak. Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan perlindungan khusus anak untuk mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak. Sasaran ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
- d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
- e. Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)
- f. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)
- g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
- h. Persentase daerah dengan peringkat ramah perempuan dan layak anak (RPLA)

Tupoksi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari tidak terlepas dari kebijakan Pusat dan Daerah dengan harapan pelaksanaannya dapat bersinergi untuk pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Khusus telaahan untuk program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan kebijakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, telah dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang bertujuan agar kabupaten/kota mampu menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sedini mungkin dan

menyediakan layanan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di tingkat kabupaten/kota.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan isu-isu strategis yang akan ditangani dalam rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari selama empat tahun ke depan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan disini merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis perangkat daerah yang dihadapi sedangkan sasaran perangkat daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam satu periode kedepan.

Tujuan jangka menengah DPPPA adalah peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dengan indikator persentase peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak dengan indikator sasarannya adalah :

- a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
- b. Capaian status Kota Layak Anak (KLA)

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Keselarasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Kendari Tahun 2023-2026
dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari 2023-2026

NO	RPD KOTA KENDARI TAHUN 2023-2026				RENSTRA DPPP TAHUN 2023-2026				
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks pembangunan gender	Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat	Indeks pembangunan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	83
			Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban yang bebas dari permasalahan sosial	Indeks keamanan dan ketertiban				Capaian Status Kota Layak Anak	Nindya

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mengimplementasikan perencanaan yang sudah disusun, pada penjabarannya dilakukan berdasarkan skala prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan yang disusun tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dalam merealisasikan perencanaan pembangunan. Adapun program dan kegiatan yang menjadi prioritas adalah sebagaimana Tabel 5 berikut :

Tabel.3.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Kendari	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaaan Anggaran Yang Tersedia	100%	
2	Administrasi keuangan perangkat daerah		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Persentase Administrasi BMD PD yang Tersedia	100%	
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian PD Yang Tersedia	100%	
5	Administrasi umum perangkat daerah		Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedia	100%	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Tersedianya BMD Penunjang Operasional Pemerintah Daerah	100%	
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100%	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD Yang Terpelihara	100%	
II	Program Pengarusutaaam Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Persentase kelembagaan PUG aktif	100%	
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	80%	
			Persentase ARG pada Pemerintah Kota	45%	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	program (outcome) dan kegiatan (output)	Besaran / Volume	Catatan
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum , Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	60%	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota		Peningkatan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	6 lembaga	
III	Program Perlindungan Perempuan		Rasio KDRT	1:13.841	
	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota		Persentase pengurangan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	55%	
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota.		Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100%	
	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota		Persentase penurunan kasus KDRT	55%	
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100%	
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota		Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.	75%	
	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota		Persentase keluarga yang mendapatkan layanan di lembaga konsultasi keluarga	15%	
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak	55%	
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Daerah kabupaten/Kota		Ketersediaan data terpilah Gender dan Anak	100%	
VI	Program Pemenuhan Hak Anak		Meningkatnya persentase pemenuhan klaster KLA	78%	
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Kelurahan Layak Anak	60%	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Kelurahan Ramah Anak	39 kelurahan	

No	Program / Kegiatan	Lokasi	program (outcome) dan kegiatan (output)	Besaran / Volume	Catatan
VII	Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	50%	
	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100%	
	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	100%	
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kab/kota		Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang sesuai standar	100%	

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 untuk mewujudkan sasaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun 2024 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merencanakan 7 program, 22 kegiatan dan 82 sub kegiatan.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja adalah proses pengaturan, pengelegasian dan pengawasan dalam proses untuk menghasilkan sesuatu. Dalam arti rencana, maka tentu ada banyak kemungkinan di masa datang yang bisa terjadi. Untuk tahun 2024 maka DPPPA akan melaksanakan 7 program dan 22 kegiatan dan 82 sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tenggara/Kota Kendari**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pmerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator kinerja program/ kegiatan dan sub kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
				Target 2024	Pagu indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu indikatif	
								Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.371.938.867	Kota Kendari	APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Pembangun an Sumber Daya Manusia, Kebudayaan , Dan Pariwisata	DPPPA	100%	4.332.512.933	DPPPA
2.08.01.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaam Anggaran Yang Tersedia	100%	100%	17.510.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangun an Sumber Daya Manusia, Kebudayaa n, Dan Pariwisata	DPPPA	100%	18.035.300	

2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen			APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 dokumen	3.182.700	
2.08.01.1.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	3.090.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 dokumen	3.182.700	
2.08.01.1.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	3.090.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 dokumen	3.182.700	
2.08.01.1.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	8 dokumen	2 dokumen	3.090.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 dokumen	3.182.700	

2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	2 laporan	2.060.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 laporan	2.121.800	
2.08.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	1 laporan	3.090.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 laporan	3.187.700	
2.08.01.1.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Terlaksana	100%	100%	3.234.131.468		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	100%	3.235.192.012	
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 orang/bulan	35 orang/bulan	3.198.780.003		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	40 orang/bulan	3.198.780.003	

2.08.01.1.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48 dokumen	12 dokumen	12.836.854		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	12 dokumen	13.221.960	
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 laporan	1 laporan	5.150.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 laporan	5.304.500	
2.08.01.1.02.07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	48 lap.bulanan 16 lap.triwulanan 8 lap. Semesteran 4 lap koordinasi	12 lap.bulanan 4 lap.triwulanan 2 laporan semesteran 1 lap. Koordinasi	17.364.611		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	12 lap.bulanan 4 lap.triwulanan 2 laporan semesteran 1 lap. Koordinasi	17.885.549	
2.08.01.1.03	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase Administrasi BMD PD yang Tersedia	100%	100%	9.748.398		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	100%	10.010.850	

2.08.01.1.03.01	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 dokumen	1 dokumen	1.030.000	Kota Kendari	APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 dokumen	1.060.900	
2.08.01.1.03.02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 laporan	1 laporan	7.718.398		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 laporan	7.949.950	
2.08.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan	1 laporan	1.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 laporan	1.000.000	
2.08.01.1.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian PD Yang Tersedia	100%	100%	298.410.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	100%	289.862.300	

2.08.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 paket				APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA			
2.08.01.1.05.03	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	1 dokumen	2.060.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 dokumen	2.121.800	
2.08.01.1.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 dokumen	1 dokumen	2.575.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 dokumen	2.652.250	
2.08.01.1.05.05	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 dokumen	1 dokumen	2.575.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 dokumen	2.652.250	

2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 orang	5 orang (1 struktural + 5 fungsional)	150.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	7 orang	140.000.000	
2.08.01.1.05.10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	160 orang	40 orang	41.200.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	40 orang	42.436.000	
2.08.01.1.05.11	Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 orang	5 orang	100.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	5 orang	100.000.000	
2.08.01.1.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Administrasi Umum PD yang Tersedia	100%	100%	385.515.584		APBD	,	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA		395.022.252	

2.08.01.1.06.01	Penyediaan komponen instalasai/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	5.150.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 paket	5.304.500	
2.08.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	3.090.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 paket	3.182.700	
2.08.01.1.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	5.150.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 paket	5.304.500	
2.08.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1 paket	26.586.584		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 paket	27.384.182	

2.08.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1 paket	25.750.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 paket	26.522.500	
2.08.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	15 dokumen	3.399.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	15 dokumen	3.500.970	
2.08.01.1.06.07	Penyediaan bahan/material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 paket	2 paket (material kantor dan bahan pameran)	61.800.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 paket (material kantor dan bahan pameran)	63.654.000	
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	12 laporan	20.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	12 laporan	20.600.000	

2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 laporan	12 laporan	180.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	12 laporan	184.841.200	
2.08.01.1.06.10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 dokumen	9 dokumen	3.090.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	9 dokumen	3.182.700	
2.08.01.1.06.11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	48 dokumen	12 dokumen	51.500.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	12 dokumen	51.545.000	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya BMD Penunjang Operasional Pemerintah Daerah	100%	100%	151.390.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	100%	83.000.000	

2.08.01.1.07.01	Pengadaan kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit kendaraan				APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA			
2.08.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	1 unit roda 2	35.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 unit roda 2	35.000.000	
2.08.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	1 paket	20.600.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA			
2.08.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	16 unit	1 unit PC2 unit laptop2 printer	70.040.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 unit laptop2 printer	48.000.000	

2.08.01.1.07.09	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya	1 unit				APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA			
2.08.01.1.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	1 unit	15.450.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA			
2.08.01.1.07.11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	2 unit	1 unit	10.300.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA			
2.08.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	100%	100%	52.933.418		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	100%	55.653.220	

2.08.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 laporan	12 laporan	18.400.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	12 laporan	20.100.000	
2.08.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48 laporan	12 laporan	18.540.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	12 laporan	19.080.000	
2.08.01.1.08.04	Pemyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	48 laporan	12 laporan	15.993.418		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	12 laporan	16.473.220	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Yang Terpelihara	100%	100%	222.300.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	100%	245.737.000	

2.09.010.1.0 9.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	25.750.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 unit	26.522.500	
2.09.010.1.0 9.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 unit	2 mobil operasional, 5 unit motor	143.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 mobil operasional, 8 unit motor	157.300.000	
2.09.010.1.0 9.06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 unit	a.13 unit laptop/PC b. 10 printer c. 1 CCTV	7.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	a.16 unit laptop/PC b. 12 printer c. 1 CCTV	9.000.000	
2.09.010.1.0 9.09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	2 unit	41.400.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	2 unit	47.610.000	

2.09.010.1.0 9.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10 unit	10 unit	3.090.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	10 unit	3.182.700	
2.09.010.1.0 9.11	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	2.060.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	DPPPA	1 unit	2.121.800	
organ	Program Pengarusutaaam Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kelembagaan PUG aktif	100%	100%	345.948.927		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Perempuan	100%	365.327.395	DPP PA
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	81%	80,00%	300.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Perempuan	81,2%	300.000.000	DPP PA

2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Pemerintah Kota	100%	45%	70.039.623		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD Kota Kendari	55%	72.140.812	
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	4 dokumen	1 dokumen	Rp 28.839.736		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD	1 dokumen	Rp 29.704.928	
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk perencanaan pembangunanan responsif gender (PPRG)	180 perangkat daerah	45 perangkat daerah	Rp 41.199.887		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD	45 perangkat daerah	Rp 42.435.883	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya	80%	60%	358.579.304		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD. Organisasi kemasyarakatan, Kelompok Perempuan	70%	369.336.684	

2.08.02.2.02. .01	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	21 dokumen	5 dokumen	291.629.304		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD. Organisasi kemasyarakatan, Kelompok Perempuan	5 dokumen	300.378.184	
2.08.02.2.02. .02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial, dan ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	42 organisasi	10 organisasi	66.950.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD. Organisasi kemasyarakatan, Kelompok Perempuan	12 organisasi	68.958.500	
2.08.02.2.03	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota	Peningkatan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan	100%	6 lembaga	217.330.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Lembaga Penyedia layanan	7 lembaga	223.849.900	
2.08.02.2.03. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	400 orang	100 orang	155.530.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	SDM Lembaga pemberdayaan	100 orang	160.195.900	

2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	18 dokumen	5 dokumen	61.800.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Masyarakat	5 dokumen	63.654.000	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	1:18.713	1 :13841	335.854.113		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata		1 :17.994	345.929.736	DPP PA
2.08.03.201	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase pengurangan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	100%	55%	130.101.889		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, OPD, NGO, Kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi	60%	134.004.946	

2.08.03.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, prpgram dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	16 dokumen	4 dokumen (Rapat Koordinasi Lintas Sektor, Sosialisasi Pencegahan KDRT sejak dini, Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kegiatan Pengembangan KIE Perlindungan Perempuan)	Rp 68.709.656		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, OPD, NGO, Kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi	4 dokumen (Rapat Koordinasi Lintas Sektor, Sosialisasi Pencegahan KDRT sejak dini, Sosialisasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Kegiatan Pengembangan KIE Perlindungan Perempuan)	Rp 70.770.946	
----------------	---	--	------------	---	---------------	--	------	---	---	---	---	---------------	--

2.08.03.201.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan	480 perangkat daerah	120 perangkat daerah	Rp 61.392.233		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD	120 perangkat daerah	Rp 63.234.000	
2.08.03.202	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kab/kota.	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100%	100%	23.442.223		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, OPD, NGO, Kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi	1	24.145.490	
2.08.03.202.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten / kota	100%	100%	Rp 10.299.423		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, Kelompok masyarakat, Lembaga Penyedia Layanan	1	Rp 10.608.406	
2.08.03.202.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota (UPTD PPA)	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	100%	100%	Rp 13.142.800		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Penegak Hukum, NGO,	1	Rp 13.537.084	

2.08.03.203	Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kab/kota	Persentase penurunan kasus KDRT	100%	55%	182.310.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, OPD, NGO, Kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi	60%	187.779.300	
2.08.03.203.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah laporan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten / kota	52 laporan	13 laporan (Sosialiasi Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dan laporan operasionalisasi UPTD PPA)	Rp 53.560.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, OPD, NGO, Kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi	13 laporan (Sosialiasi Lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan dan laporan operasionalisasi UPTD PPA)	Rp 55.166.800	

2.08.03.203.02	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	Jumlah sumber daya manusia lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kab/kota	120 orang	30 orang	Rp 51.500.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, OPD, NGO, Kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi	30 orang	Rp 53.045.000	
2.08.03.203.03	Penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kab/kota (UPTD PPA)	Jumlah perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	100%	100%	Rp 5.150.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, OPD, NGO, Kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi	1	Rp 5.304.500	
2.08.03.203.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	4 dokumen	1 dokumen	Rp 72.100.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Kaum Perempuan, OPD, NGO, Kelompok masyarakat, Perguruan Tinggi	1 dokumen	Rp 74.263.000	

2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sesuai standar	100%	100%	104.030.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	PUSPAGA	100%	107.150.900	DPP PA
2.08.04.201	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan.	82%	75%	97.850.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Lembaga penyedia layanan., masyarakat kota Kendari, OPD terkait	80%	100.785.500	
2.08.04.201.01	Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak	120 perangkat daerah	30 perangkat daerah	41.200.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Lembaga penyedia layanan, OPD terkait	30 perangkat daerah	42.436.000	
2.08.04.201.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga	12 dokumen	3 dokumen	30.900.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Lembaga penyedia layanan., masyarakat kota Kendari, OPD terkait	3 dokumen	31.827.000	

2.08.04.201.03	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota	Jumlah laporan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga	4 laporam	1 laporan	25.750.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Lembaga penyedia layanan., masyarakat kota Kendari, OPD terkait	1 laporan	26.522.500	
2.08.04.203	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase keluarga yang mendapatkan layanan di lembaga konsultasi keluarga	100%	15%	6.180.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Masyarakat kota Kendari, Lembaga penyedia layanan keluarga, OPD terkait	20%	6.365.400	
2.08.04.203.01	Pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi Keluarga dalam mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan perlindungan anak	100%	100%	6.180.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Masyarakat kota Kendari, Lembaga penyedia layanan keluarga, OPD terkait	100%	6.365.400	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Gender dan Anak	65%	55%	80.900.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Perangkat Daerah	60%	83.327.000	DPP PA

2.08.05.201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Daerah kabupaten/Kota	Ketersediaan data terpilah Gender dan Anak	100%	100%	80.900.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait	100%	83.327.000	
2.08.05.201.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak	8 dokumen	2 dokumen	30.900.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait	2 dokumen	31.827.000	
2.08.05.201.02	Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten / kota	Jumlah dokumen penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota	4 dokumen	1 dokumen	50.000.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait	1 dokumen	51.500.000	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak	Meningkatnya persentase pemenuhan klaster KLA	85%	78%	752.226.413		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, Kecamatan/Kelurahan, dunia usaha, media	82%	784.836.206	DPP PA

2.08.06.201	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kelurahan Layak Anak	72%	60%	287.539.209		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, Kecamatan/Kelurahan, dunia usaha, media	66%	296.165.386	
2.08.06.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	331 organisasi	77 organisasi	100.837.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, Kecamatan/Kelurahan, dunia usaha, media	88 organisasi	103.862.110	

2.08.06.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	16 dokumen	4 dokumen	186.702.209		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, Kecamatan/Kelurahan, dunia usaha, media	4 dokumen	192.303.276	
2.08.06.202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelurahan Ramah Anak	47 kelurahan	39 kelurahan	464.687.204		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, Kecamatan/Kelurahan, dunia usaha, media	43 kelurahan	488.670.820	
2.08.06.202.01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	320 orang	100 orang	48.400.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	Forum anak dan anak sekota Kendari	50 orang	59.895.000	

2.08.06.202. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	1 dokumen	90.639.705		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, Kecamatan/Kelurahan, dunia usaha, media	1 dokumen	93.358.897	
2.08.06.202. 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	8 dokumen	2 dokumen	263.436.315		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, Kecamatan/Kelurahan, dunia usaha, media	2 dokumen	271.339.405	

2.08.06.202.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	4 dokumen	1 dokumen	62.211.183		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, Forum Anak, Organisasi Masyarakat, Kecamatan/Kelurahan, dunia usaha, media	1 dokumen	64.077.519	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	80%	50%	622.053.604		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lemabga layanan	70%	640.715.212	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.07. 201	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	100%	100%	155.597.199		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lemabga layanan	100%	160.265.115	

2.08.07.201.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	228 perangkat daerah	57 perangkat daerah	78.421.065		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait	57 perangkat daerah	80.773.697	
2.08.07.201.02	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/kota	16 dok%	4 dok	77.176.135		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lemabga layanan	4 dok	79.491.419	
2.08.07.202	Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan penanganan	100%	100%	60.565.925		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lemabga layanan	100%	62.382.903	

2.08.07.202.01	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota (UPTD PPA)	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	100%	100%	19.254.701		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lembaga penyedia layanan	100%	19.832.342	
2.08.07.202.02	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota (UPTD PPA)	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	100%	100%	7.273.407		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lembaga penyedia layanan	100%	7.491.609	
2.08.07.202.03	Pengembangan komunikasi, Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen komunikasi, Informasi dan Edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	8 dokumen	2 dokumen	6.227.818		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lembaga penyedia layanan	2 dokumen	6.414.652	

2.08.07.202.04	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	4 dokumen	1 dokumen	27.810.000		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lembaga penyedia layanan	1 dokumen	28.644.300	
2.08.07.203	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Tingkat daerah kab/kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang sesuai standar	100%	100%	405.890.480		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lembaga penyedia layanan	100%	418.067.194	
2.08.07.203.01	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	52 dokumen	13 dokumen (1 laporan koordinasi +12 laporan Operasional UPTD)	33.229.407		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lembaga penyedia layanan	13 dokumen (1 laporan koordinasi +12 laporan Operasional UPTD)	34.226.289	

2.08.07.203.02	Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	4 dokumen	3 dokumen	347.735.266		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lembaga penyedia layanan	3 dokumen	358.167.324	
2.08.07.203.03	Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	4 dokumen	1 dokumen	24.925.807		APBD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan, Dan Pariwisata	OPD terkait, penegak hukum, NGO, masyarakat, media, Lembaga penyedia layanan	1 dokumen	25.673.582	

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan dan Pemberdayaan Perempuan Kota Kendari 2023-2026 dalam menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang dioperasikan melalui Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Kendari Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitas pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun yang lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari Tahun 2024, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Renstra diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama PD lingkup Pemerintah Kota Kendari maupun dengan PD yang membidangi fungsi lain.